

STUDI KASUS HUKUM

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Jap)

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

GITAAZZAHRA

2110112189

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing:

Efren Nova, S.H., M.H.

Dr. Lucky Raspati, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No. Reg: 32/PK-IV/IV/2025

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS PADA PERKARA TINDAK
PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor
329/Pid.Sus/2024/PN Jap)**

*(Gita Azzahra, 2110112189, 71+viii halaman, Hukum Pidana, Fakultas Hukum,
Universitas Andalas, 2025)*

ABSTRAK

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang kerap terjadi dalam lingkungan rumah tangga, umumnya pelaku orang terdekat anak. Tidak jarang dalam praktik penegakan hukumnya, pembuktian tindak pidana pencabulan terhadap anak ini menghadapi kendala serius dikarenakan pencabulan sering kali terjadi di ruang tertutup dan sepi, artinya tidak ada saksi langsung yang melihat perkara tersebut. Minimnya bukti ini tidak jarang membuat hakim selaku pemeriksa perkara tidak yakin bahwa telah terjadi tindak pidana, sehingga pelaku dijatuhkan putusan bebas seperti perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 329/Pid.Sus//2024/PN Jap. Penelitian ini membahas: 1. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak pada putusan Nomor : 329/Pid.Sus/2024/PN Jap sesuai ketentuan pembuktian hukum pidana formal yang berlaku. 2. Kekuatan pembuktian keterangan anak sebagai saksi korban dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak pada putusan Nomor : 329/Pid.Sus/2024/PN Jap menurut hukum yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis serta menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas tidak sesuai dengan ketentuan pembuktian dalam hukum pidana formal yang berlaku dikarenakan hakim menilai keterangan anak sebagai saksi korban sebagai satu-satunya alat bukti yang ada dan mengabaikan alat bukti sah lainnya seperti keterangan ahli, keterangan saksi *Testimonium de Auditu*, serta surat kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Selain itu keterangan anak memiliki kekuatan pembuktian apabila merujuk pada UU SPPA dan UU TPKS, meskipun dalam KUHP keterangan anak hanya sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian. Saran terhadap hasil penelitian adalah diperlukan penguatan pemahaman hakim terhadap penerapan hukum melalui pelatihan terpadu tentang pendekatan berbasis korban dan menjadikan UU TPKS sebagai acuan utama dalam pemeriksaan perkara tindak pidana pencabulan. Selain itu pemerintah perlu melakukan revisi dalam ketentuan KUHP mengenai keterangan saksi tanpa disumpah agar tercipta integrasi kebijakan dengan ketentuan diluar KUHP.

Kata Kunci : Putusan Bebas, Tindak Pidana Pencabulan, Pembuktian, Anak

**ANALYSIS OF AN ACQUITTAL VERDICT IN A CHILD ABUSE CASE
(CASE STUDY OF COURT DECISION NUMBER 329/PID.SUS/2024/PN JAP)**

(Gita Azzahra, 2110112189, 71+viii pages, Criminal Law, Faculty of Law, Andalas University, 2025)

ABSTRACT

Child abuse constitutes a form of sexual violence that frequently occurs within the domestic sphere, with perpetrators often being individuals in close proximity to the child. Frequently seen in law enforcement practice, child abuse case faces significant challenges, as the acts typically take place in closed and quiet place, leaving no direct eyewitnesses. This evidentiary limitation often leads the court, as the trier of fact, doubting the occurrence of the sexual abuse, which may result in an acquittal—as decision number 329/Pid.Sus/2024/PN Jap. This research discusses: 1. The basis for the judge's consideration of acquitting the perpetrator of the crime of child abuse in court decision number: 329/Pid.Sus/2024/PN Jap in accordance with the provisions of formal criminal law evidence . 2. The strength of the evidence of the child's testimony as a victim witness in the case of the crime of child abuse in court decision number: 329/Pid.Sus/2024/PN Jap according to applicable law. Employing a normative legal research methodology with a descriptive-analytical approach, this research adopts both case-based and statutory approaches. Based on research findings, the basis for the judge's consideration in imposing an acquittal verdict was not in accordance with the provisions of evidence in the applicable formal criminal law because the judge considers the child's testimony as a victim witness as the only evidence available while disregarding other admissible forms of proof such as expert testimony, *testimonium de auditu*, and a written settlement agreement between the victim and the perpetrator. According the Juvenile Criminal Justice System Act (UU SPPA) and the Sexual Violence Act (UU TPKS), a child's testimony possesses probative value; however, according the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHAP), such testimony was classified merely as supplementary to other admissible evidence and therefore lacks independent probative force. Suggestions for the research results are that it is necessary to strengthen judges' understanding of the application of the law through integrated training on a victim-based approach and make the TPKS Law the main reference in examining cases of sexual abuse. In addition, the government needs to revise the provisions of the Criminal Procedure Code regarding unsworn witness testimony in order to create policy integration with provisions outside the Criminal Procedure Code.

Keywords: Acquittal, Crime of Sexual Abuse, Evidence, Children